

**MODEL KOMITE SEKOLAH TRANSFORMASIONAL
STUDI KASUS DI DKI JAKARTA**

(Penelitian Evaluasi Model CIPP)



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2021**

UJIAN TERBUKA DISERTASI PROMOSI DOKTOR

Promotor



Prof. Dr. Zulela MS, M.Pd

Tanggal: 17 - 02 - 2021

Co-Promotor



Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd.

Tanggal: 16 - 02 - 2021

Nama



22 - 02 - 2021
(Tanda Tangan) (Tanggal)

Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd

(Ketua)¹



17 - 02 - 2021
(Tanda Tangan) (Tanggal)

Prof. Dr. Zulela MS, M.Pd

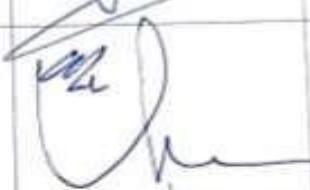
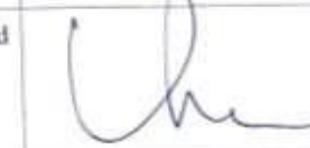
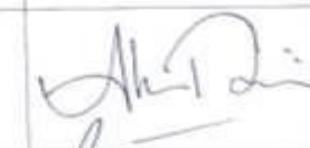
(Sekretaris)²

Nama : UDIT
No. Registrasi : 7527130135
Program Studi : Pendidikan Dasar
Tanggal Lulus :



BUKTI PENGESAHAN PERBAIKAN UJIAN TERTUTUP DISERTASI

Nama : Udit
No. Registrasi : 7527130135
Program Studi : S3-Dikdas
Ujian Tertutup : Selasa, 8 Desember 2020

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd. (Ketua)		22-2-2021
2.	Prof. Dr. Zuleila MS, M. Pd (Promotor)		
3.	Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd. (Kopromotor)		
4.	Prof. Dr. Moch. Syarif Sumantri, M.Pd (Penguji)		
5.	Prof. Dr. Ir. Arita Marini, ME. (Penguji)		
6.	Prof. Dr. H. Soleh Hidayat, M.Pd. (Penguji luar)		

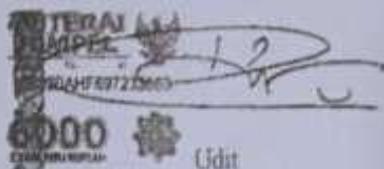
LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 'Disertasi' yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-perundangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Februari 202





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telepon/Faksimili: 021-4894221
Laman: lib.unj.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : UDIT
NIM : 7527130135
Fakultas/Prodi : Pascasarjana/S.3/Pendidikan Dasar
Alamat email : uditgrisel@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpusatakaan Universitas Negeri Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Model Komite Sekolah Transformasional

Studi Kasus di DKI Jakarta (Penelitian Evaluasi Model CIPP)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini UPT Perpusatakaan Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap meneantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpusatakaan Universitas Negeri Jakarta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta 28 Maret 2021

Penulis

(UDIT)
nama dan tanda tangan

**TRANSFORMATIONAL SCHOOL COMMITTEE MODEL CASE STUDY IN
DKI JAKARTA (CIPP Model Evaluation Research)**

U D I T
7527130135

ABSTRACT

This research aims to evaluate the transformational school committee model in improving the performance of elementary schools in Cipayung sub-district. Method used evaluation study method with CIPP model. The results showed; (1). Context, the purpose of establishing a school committee consisting of channeling, responsible, transparent, accountable, and democratic. But there are no specific schedules to absorb the aspirations of the community, (2). Input, the implementation of recruitment of members of Cipayung Subdistrict School Committee is not fully done through the procedures established by the legislation, the Electoral Committee of prospective members of Cipayung Subdistrict School Committee is not formed and established by the principal but by members of the school committee of Cipayung Subdistrict, (3) Process, implementation of the function of the school committee, the implementation of the school Committee duties, and the implementation of the School committee's role has been good, but Schools have not maximally worked with the DUDI Party, (4) Product, performance enhancement consisting of better education services, completion of tasks, professionals in carrying out their roles and functions and improving student achievement. Conclusion has not been a similarity of concept of work and there are differences of perception about role and function of School Committee.

Keywords: programs, committees, schools, improving, performance

**MODEL KOMITE SEKOLAH TRANFORMASIONAL STUDI KASUS DI DKI
JAKARTA** (Penelitian Evaluasi Model CIPP)

U D I T
7527130135

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi model komite sekolah transformasional dalam meningkatkan kinerja Sekolah Dasar di Kecamatan Cipayung. Metode yang digunakan metode studi evaluasi dengan model CIPP. Hasil penelitian menunjukkan; (1). *Context*, tujuan pembentukan komite sekolah yang terdiri dari menyalurkan aspirasi, bertanggung jawab, transparan, akuntabel, dan demokratis. Namun belum ada jadwal khusus untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, (2). *Input*, pelaksanaan rekrutmen anggota Komite Sekolah Dasar di Kecamatan Cipayung tidak sepenuhnya dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, panitia pemilihan calon anggota Komite Sekolah Dasar di Kecamatan Cipayung tidak dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah tetapi oleh anggota Komite Sekolah Dasar di Kecamatan Cipayung demisioner, (3) *Process*, pelaksanaan fungsi komite sekolah, pelaksanaan tugas komite sekolah, dan pelaksanaan peran komite sekolah sudah berjalan baik, namun komite sekolah belum secara maksimal bekerja sama dengan pihak DUDI, (4) *Product*, peningkatan kinerja yang terdiri dari layanan pendidikan semakin baik, penyelesaian tugas, profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya serta meningkatkan prestasi siswa. Kesimpulan belum adanya kesamaan konsep kerja dan adanya perbedaan persepsi tentang peran dan fungsi komite sekolah.

Kata Kunci: *Program, Komite, Sekolah, Meningkatkan, Kinerja*

RINGKASAN

Pendahuluan

Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. komite sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS). Salah satu tujuan pembentukan komite sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan kinerja pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan inovatif demi kemajuan sekolah.

Komite sekolah dibentuk di setiap sekolah sebagai hasil dari SK Menteri No. 202 untuk desentralisasi. Komite diharapkan bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Kenyataan di lapangan khususnya SDN di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur dikatakan bahwa dalam perjalannya dari 2002 hingga saat ini, kinerja komite sekolah di Jakarta mulai dipertanyakan. Berbagai masalah muncul dalam tubuh komite sekolah tersebut, sehingga perannya dalam mengawal pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tidak lagi efektif. Komite sekolah dianggap belum memberikan kontribusi besar dalam peningkatan pelayanan pendidikan di sekolah.

Komite sekolah tidak mampu melaksanakan peran dan fungsi sebagaimana mestinya. Komite sekolah tidak memiliki daya kritis terhadap kebijakan pendidikan di sekolah. Kevakuman komite sekolah tersebut lebih disebabkan oleh dominasi peran negara (kepala daerah) dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan di daerah, sehingga secara politik komite sekolah tidak perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah baik anggaran, sarana prasarana maupun sumber daya manusia (SDM). Kuatnya dominasi peran kekuasaan kepala daerah menyebabkan komite

sekolah berada pada posisi termarginalkan dari proses-proses dan kegiatan pendidikan di sekolah.

Alasan memilih Sekolah Dasar Negeri di Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai tempat penelitian didasarkan pada beberapa hal, yaitu: *pertama*, berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti SDN Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan gambaran lain terhadap eksistensi komite sekolah, di antaranya komite sekolah sudah memiliki struktur organisasi, pemilihan pengurus komite sekolah melalui demokrasi, walau belum memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, komite sekolah memiliki program kerja tahunan, walaupun tidak memiliki program anggaran, komite sekolah ikut menandatangani Kurikulum dan Rencana Kerja Sekolah, walau tidak dilibatkan dalam penyusunannya.

Kedua, Sejak dikeluarkan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, tentang larangan pungutan dalam bentuk apapun di Sekolah Dasar Negeri. Walaupun terdapat beberapa kelemahan namun peran komite sekolah tetap menunjukkan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja pendidikan SDN di Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan yang dilakukan komite sekolah yakni kondisi kelembagaan komite sekolah, keahlian/kecakapan SDM komite sekolah, komitmen pengurus komite sekolah dan dukungan peran serta masyarakat.

Ketiga, menurut Penelitian yang dilakukan Balitbang Diknas RI menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah masih rendah, yaitu rata-rata hanya 57,10%. Partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang sangat rendah itu ialah dalam hal menentukan kebijakan program sekolah dan mengawasinya, pertemuan rutin, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan iklim sekolah. Partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi ialah dalam mengawasi kinerja sekolah, pertemuan BP3, pembayaran dan bentuk iuran BP3 per bulan serta sumbangan uang gedung untuk peserta didik baru.

Berdasarkan realitas rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya peran komite sekolah, kiranya perlu dilakukan terobosan untuk meningkatkan

implementasi peran komite sekolah (masyarakat). Komponen sekolah yang dipandang tepat dalam pemberdayaan masyarakat adalah kepala sekolah dan ketua komite sekolah. Sebagaimana menurut Zamroni bahwa kegagalan peran komite sekolah menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas obyektif dan subyektif dalam satuan pendidikan.

Terdapat beberapa aspek yang akan diteliti terkait komite sekolah di antaranya; *context* terhadap tujuan pembentukan komite sekolah, *input* terhadap rekrutmen pembentukan komite sekolah, *process* terhadap pelaksanaan fungsi komite sekolah, pelaksanaan tugas komite sekolah, peran komite sekolah, dan peningkatan kinerja guru.

Metode Penelitian

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode penelitian evaluasi program. Komponen-komponen yang dievaluasi dengan pendekatan model evaluasi CIIPP (*Context, Inputs, Process, dan Product*), yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Sumber data utama (*key informant*) dalam penelitian ini didapat data dari informan guru, kepala sekolah, komite sekolah, masyarakat, dan dinas pendidikan. Dari sumber informasi ini akan dilakukan beberapa metode pengumpulan data seperti wawancara, dokumentasi dan observasi untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang program komite sekolah dalam meningkatkan kinerja guru SDN di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur.

Hasil Penelitian

1. *Context*

Pada aspek *context* terkait dengan tujuan pembentukan komite sekolah yang terdiri dari menyalurkan aspirasi, bertanggung jawab, transparan, akuntabel, dan demokratis sehingga dapat dijelaskan di bawah ini:

Menyalurkan aspirasi, Komite Sekolah Dasar di Kecamatan Cipayung menyalurkan aspirasi orang tua peserta didik biasanya melalui paguyuban kelas yang diwadahi oleh komite sekolah pada tingkat sekolah dasar. Semua permasalahan layanan pendidikan di sekolah disampaikan melalui pengurus paguyuban kelas yang selanjutnya dikomunikasikan melalui komite sekolah.

Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat terutama sekolah dilakukan komite sekolah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang terdiri dari monev pelaksanaan kurikulum, monev sarana dan prasarana, monev tenaga pendidik dan kependidikan, serta monev pelaksanaan anggaran. Selain itu, kegiatan menghimpun dan menganalisis keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Pendidikan dilakukan juga berdasarkan pengaduan langsung masyarakat di sekretariat komite sekolah yang dilakukan secara terjadwal.

Bertanggung jawab, komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Komite sekolah memiliki wadah transparansi dan pertanggungjawaban layanan pendidikan setiap sekolah terhadap masyarakat. Komite sekolah, biasanya disampaikan dalam rapat-rapat komite sekolah untuk memberikan laporan-laporan kegiatan sekolah kemudian disampaikan ke masyarakat.

Transparan, Komite sekolah dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Agar pelaksanaan anggaran di setiap satuan pendidikan terutama sekolah-sekolah tersebut sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaannya dan dikelola secara transparan. Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan komite sekolah, telah dilakukan monitoring dan evaluasi atau monev. Selama ini yang sudah dilakukan seperti monev dana BOS, dan monev dana BOP. Tujuan monev ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran dari dana tersebut sesuai dengan juknis yang ada dan benar-benar dikelolah secara transparan. Hasil monev dibuat analisis dan evaluasinya yang nanti akan disampaikan kepada Kepala Sekolah dan instansi terkait.

Akuntabel, bagi komite sekolah, hasil penyempurnaan kebijakan dan program tersebut juga harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga terjadi

umpan balik (*feedback*) bagi keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah dapat akuntabel kepada masyarakat.

Demokratis, Keanggotaan komite sekolah terdiri dari unsur masyarakat yang dapat berasal dari; perwakilan orang tua/wali murid berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis, para tokoh masyarakat (Ketua RT/RW, ulama, budayawan, dan sebagainya), anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan, pejabat pemerintah setempat (Kelurahan, Puskesmas, Kepolisian, Koramil, dan instansi lain), pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan, organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, APSI, IGTK, dan lain-lain), yang dipilih secara demokratis.

Berdasarkan hasil evaluasi secara umum terkait context dikategorikan baik dan sudah sesuai standar Kepmendiknas Nomor 44 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

2. Masukan (*Input*)

Pada aspek *context* terkait dengan rekrutmen pembentukan komite sekolah dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan rekrutmen anggota Komite Sekolah Dasar di Kecamatan Cipayung tidak sepenuhnya dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Pelaksanaan rekrutmen calon anggota Komite Sekolah Dasar di Kecamatan Cipayung masih ditemukan masalah. Pertama, masih ada panitia pemilihan calon anggota komite sekolah di Kecamatan Cipayung tidak dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah tetapi oleh anggota komite sekolah demisioner. Kedua, calon anggota komite sekolah yang mendaftar tidak melalui *fit and proper test* sebagai bagian dari proses rekrutmen atau seleksi. Ketiga, terdapat calon anggota „siluman“ atau calon yang tidak mendaftar sebagai calon anggota komite sekolah tetapi ditetapkan sebagai anggota komite sekolah terpilih bahkan yang bersangkutan menjadi salah satu pengurus inti. Keempat, terdapat anggota komite sekolah yang telah habis masa tugasnya tidak

dilakukan pemilihan ulang, tetapi langsung ditetapkan kembali oleh Kepala Sekolah. Kelima, pengusulan calon anggota komite sekolah kepada Kepala Sekolah tidak melalui konsultasi dan rekomendasi organisasi profesi terlebih dahulu. Namun demikian, juga ditemukan fakta-fakta adanya unsur-unsur proses rekrutmen yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pengumuman pendaftaran calon anggota komite sekolah dan pemilihan secara demokrasi melalui pemungutan suara terbanyak, musyawarah dan mufakat.

Berdasarkan hasil evaluasi secara umum terkait input dikategorikan cukup karena masih terdapat beberapa kelemahan seperti perekrutan komite sekolah tidak sesuai prosedur.

3. Proses (*Process*)

Pada aspek *process* terkait dengan pelaksanaan fungsi komite sekolah, pelaksanaan tugas komite sekolah, dan pelaksanaan peran komite sekolah sehingga dapat dijelaskan di bawah ini:

Pelaksanaan fungsi komite sekolah yang terdiri dari: (1) Komitmen, komite sekolah memiliki komitmen yang tinggi. (2) Bekerja sama, dapat bekerja sama dengan masyarakat, dan pihak sekolah. Namun disadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki seperti pertemuan atau rapat yang dilakukan komite sekolah juga belum terjadwal, artinya tidak ada pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap bulan maupun per triwulan, bahkan ada komite sekolah yang hanya melaksanakan pertemuan dua kali setahun. Idealnya pertemuan pengurus dilaksanakan setiap bulan atau minimal sekali dua bulan, namun karena banyaknya kesibukan pengurus mengakibatkan pertemuan tidak terlaksana, akhirnya pertemuan dilaksanakan tergantung kebutuhan sekolah, misalnya pada saat penerimaan siswa baru dan adanya permasalahan siswa. (3) Menganalisis aspirasi, komite sekolah juga menganalisis aspirasi yang diajukan masyarakat, baik masyarakat internal sekolah maupun eksternal sekolah. (4) Memberikan masukan, semua keluhan yang disampaikan orang tua siswa tetap ditampung komite sekolah yang selanjutnya akan disampaikan kepada kepala sekolah yang membidangi hal tersebut. (5) Memberikan rekomendasi, sampai saat ini komite sekolah menjalin

hubungan baik dengan masyarakat khususnya orang tua siswa, dimana setiap ada hal-hal penting yang ingin dilaksanakan di sekolah, komite tetap mengundang orang tua siswa untuk mengadakan pertemuan dan selanjutnya hasil musyawarah tersebut disampaikan kepada pihak sekolah. (6) Berpartisipasi, pengelolaan sumber daya pendidikan, dengan mengidentifikasi kondisi sumber daya sekolah dan sumber daya masyarakat, memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah dan mengkoordinasikan bantuan masyarakat. Dalam hal penghubung dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, pihak komite sekolah masih kurang berperan, belum sampai kepada penggalangan dana dari masyarakat seperti dunia usaha dan dunia industri ataupun masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.

Pelaksanaan tugas komite sekolah yang terdiri dari: (1) Menggalang dana, Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta belum memberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan komite sekolah dengan belum memberikan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan SDM. Dengan belum adanya dukungan dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta tersebut memberikan hambatan komite sekolah dalam mengimplementasikan program yang dimilikinya. Demikian pula komite sekolah belum mampu bekerjasama dengan pihak pengusaha untuk dapat terlibat dalam penggalangan dana sehingga hanya berharap sumbangsih sukarela yang tidak mengikat dari Orang tua peserta didik.

(2) Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, komite sekolah juga menindaklanjuti berbagai keluhan, saran dan kritik dari masyarakat walaupun tidak tersurat, sehingga saran dari masyarakat tidak diabaikan serta untuk kemajuan sekolah.

Pelaksanaan Peran komite sekolah yang terdiri dari (1) Memberi pertimbangan (*advisory agency*), komite sekolah sebagai badan pertimbangan berperan melaksanakan program seperti yang pertama, perencanaan sekolah yaitu, memberikan masukan terhadap penyusunan Kurikulum Sekolah dan pengesahan RKAS, terlibat dalam rapat dan penetapan Kurikulum dan RKAS (sekolah, orang tua siswa, masyarakat) maupun memberikan pertimbangan tentang perubahan RKAS. Yang kedua dalam hal pelaksanaan program, dengan memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan dan proses pembelajaran kepada para guru.

Peran yang ketiga adalah dalam hal pengelolaan sumber daya pendidikan, dengan memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah, tentang sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah serta anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah. (2) Pendukung (*supporting agency*), Komite Sekolah Dasar di Kecamatan Cipayung menyampaikan dukungan atas program-program Kepala Sekolah di Bidang Pendidikan terkait peningkatan anggaran pendidikan, pemberian bantuan bagi siswa yang berprestasi, pemberian pakaian seragam sekolah pada siswa yang kurang mampu, terlibat aktif dalam kepanitiaan, mendukung pemberdayaan komite. (3) Pengontrol (*controlling agency*), komite sekolah melaksanakan perannya sebagai pengontrol, seperti perencanaan sekolah harus diketahui komite setiap saat, memantau proses belajar siswa apa perlu diadakan pelajaran tambahan, memantau keadaan siswa yang patut dibantu. Komite juga memantau kegiatan ekstrakurikuler siswa, seperti kegiatan pramuka dan palang merah remaja, memantau pelaksanaan program sekolah, dengan organisasi sekolah, memantau penjadwalan program sekolah, memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah memantau sumber daya pelaksana program dan memantau partisipasi *stake holder* pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah.

Berdasarkan hasil evaluasi secara umum terkait process dikategorikan cukup hal ini dikarenakan konsep kerja komite sekolah belum menunjukkan adanya keseragaman, hal ini disebabkan adanya perbedaan persepsi tentang peran dan fungsinya dimana pihak komite sekolah masih ada yang beranggapan bahwa tugas dan wewenangnya hanya membantu kelancaran pendidikan saja, dan tidak mencampuri urusan teknis pengajaran yang termasuk wewenang kepala sekolah, guru dan instansi pembina pendidikan, artinya peran dan fungsi Komite masih disamakkannya dengan tugas wewenang BP3.

4. Product

Pada aspek *product* terkait dengan peningkatan kinerja yang terdiri dari layanan pendidikan semakin baik, penyelesaian tugas, professional dan berprestasi sehingga dapat dijelaskan di bawah ini:

Layanan pendidikan semakin baik, komite sekolah dan pemangku kepentingan (stakeholder) sekolah berupaya meningkatkan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi komite sekolah, mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan dalam bentuk seperti; orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dana serta pemikiran atau sumbang saran yang diperlukan untuk kemajuan sekolah. Orang tua dan masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang dimiliki anaknya serta memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang program pendidikan yang sedang diperlukan oleh masyarakat. Temuan mengenai peran komite sekolah dalam peningkatan kinerja sekolah terkait mutu layanan sekolah peneliti klasifikasi ke dalam enam indikator dari layanan bermutu suatu sekolah. Keenam indikator tersebut yaitu layanan belajar bagi siswa, pengelolaan dan layanan siswa, sarana dan prasarana, program dan pembiayaan, partisipasi masyarakat, dan budaya sekolah.

Penyelesaian tugas Kepala Sekolah, komite sekolah dan pemangku kepentingan (stakeholder) sekolah dalam perannya lebih aktif dalam penyelenggaraan pendidikan berupa memberikan dukungan dalam pelaksanaan program di sekolah dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan sekolah dalam meningkatkan kinerja Kepala Sekolah. Sebagai mitra dari sekolah komite sekolah sudah berjalan dengan baik, khususnya dalam mendukung program sekolah, tetapi sebagai badan pengontrol komite sekolah masih minim seperti mengevaluasi penggunaan anggaran sekolah, belum dilibatkan secara aktif dalam setiap perencanaan sekolah.

Profesional Guru, komite sekolah dan pemangku kepentingan (stakeholder) sekolah di Kecamatan Cipayung bekerja membantu profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya. Komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan bagi sekolah memiliki arti, bahwa komite sekolah dipandang sebagai mitra kerja kepala sekolah dan guru yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan sekolah. Semua program-program sekolah yang akan dilaksanakan senantiasa

dikonsultasikan dengan komite sekolah. Hal ini dikarenakan, program yang akan diterapkan ataupun yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat internal maupun eksternal sekolah.

Berprestasi, komite sekolah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sekolah di Kecamatan Cipayung terlibat aktif dalam meningkatkan prestasi akademik dan nonakademik siswa. Hal ini terlihat beberapa program yang dicanangkan oleh komite sekolah untuk memicu semangat belajar siswa seperti pemberian bantuan bagi siswa yang berprestasi, membantu siswa yang kurang mampu, dan mengadakan lomba cerdas cermat bagi siswa. Namun komite sekolah dan guru menyadari bahwa apa yang mereka lakukan belum sepenuhnya secara maksimal dan masih terdapat beberapa kendala seperti kekurangan dana. Namun hal tersebut tidak mengurangi motivasi dan semangat komite sekolah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sekolah untuk memajukan prestasi siswa. Walaupun komite sekolah tidak berperan secara langsung proses pembelajaran di dalam kelas, namun dapat membuat berbagai program kegiatan ekstrakurikuler yang dapat ditawarkan kepada kepala sekolah.

Berdasarkan hasil evaluasi secara umum terkait product dikategorikan baik dan sudah sesuai standar Kepmendiknas Nomor 44 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa “Disertasi” yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-perundangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Februari 2021



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
RINGKASAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR GRAFIK	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	14
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penelitian	16
E. Signifikansi Penelitian	17
F. Kebaruan Penelitian (<i>State of the Art</i>)	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Konsep Evaluasi Program Komite Sekolah	21
1. Konsep Evaluasi Program	21

2.	Pengertian Evaluasi Program Komite Sekolah	24
3.	Tujuan dan Kegunaan Evaluasi Pelaksanaan Program Komite Sekolah	27
4.	Evaluasi Keberhasilan Program Komite Sekolah	33
B.	Konsep Program Komite Sekolah Yang Dievaluasi	34
1.	Tujuan Pembentukan Komite Sekolah.....	42
2.	Rekrutmen Komite Sekolah	45
3.	Fungsi Komite Sekolah.....	49
4.	Tugas Komite Sekolah	52
5.	Peran Komite Sekolah	54
6.	Program Kerja Komite Sekolah	62
C.	Konsep Kinerja.....	70
D.	Model-model Evaluasi Program	86
1.	<i>Goal Oriented Evaluation Model</i>	87
2.	<i>Goal Free Evaluation Model</i>	87
3.	<i>Formatif-Sumatif Evaluation Model</i>	88
4.	<i>Evaluasi Formatif</i>	89
5.	<i>Evaluasi Summatif</i>	90
6.	<i>Countenance Evaluation Model</i>	91
7.	<i>Responsive Evaluation Model</i>	92
8.	<i>CSE-UCLA Evaluasi Model</i>	93
9.	Model Evaluasi CIPO.....	94
10.	Model Evaluasi DEM.....	100
11.	Model CIPP (<i>Context, Input, Process, Product</i>)	104
E.	Hasil Penelitian yang Relevan	115
F.	Kriteria Evaluasi.....	116
	BAB III METODOLOGI PENELITIAN	119
A.	Tempat dan Waktu Penelitian	119
1.	Tempat Penelitian.....	119
2.	Waktu Penelitian	121

B.	Pendekatan, Metode, dan Desain Penelitian	121
C.	Instrumen Penelitian.....	123
1.	Definisi Konseptual.....	123
2.	Definisi Operasional.....	124
3.	Kisi-Kisi Instrumen	124
4.	Validasi Instrumen	128
D.	Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	130
1.	Teknik Pengumpulan Data	130
2.	Prosedur Pengumpulan Data	132
E.	Teknik Analisis Data.....	135
F.	Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	136
1.	Kriteria Keabsahan Data	136
2.	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	138
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	141	
A.	Profil Responden	141
1.	SDN Bambu Apus 01	141
2.	Profil SDN Cilangkap 01	142
3.	Profil SDN Cipayung 01	143
4.	Profil SDN Lubang Buaya 13	144
5.	Profil SDN Munjul 01	145
B.	Hasil Penelitian	146
1.	Evaluasi Konteks.....	147
2.	Evaluasi Input.....	158
a.	Rekrutmen Komite Sekolah Dasar di Kecamatan Cipayung ...	158
b.	Struktur Komite Sekolah di Kecamatan Cipayung	164
c.	Pembentukan Komite Sekolah di Kecamatan Cipayung.....	171
3.	Evaluasi Proses.....	172
a.	Pertimbangan dan Arahan Komite Sekolah	172
b.	Dukungan Dana dan Sumber Daya Komite Sekolah	181
c.	Pengawasan Komite Sekolah (<i>controlling agency</i>)	192



d. Menyeraf Aspirasi Keluhan, Kritik, Saran dan Tindak Lanjut Komite Sekolah	201
4. Evaluasi Product.....	207
a. Peningkatan Kinerja Sekolah	207
b. Penyelesaian Tugas Kepala Sekolah.....	217
c. Profesionalisme Guru.....	218
d. Berprestasi	219
C. Pembahasan.....	235
1. Evaluasi Konteks.....	235
2. Evaluasi <i>Input</i>	240
3. Evaluasi Proses.....	247
4. Evaluasi Produk.....	256
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	275
A. Kesimpulan	275
B. Rekomendasi	285
DAFTAR PUSTAKA	288
RIWAYAT HIDUP	379

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komponen tujuan pembentukan komite sekolah.....	45
Tabel 2.2	Komponen perekutan komite sekolah	48
Tabel 2.3	Komponen fungsi komite sekolah	50
Tabel 2.4	Komponen tugas komite sekolah	55
Tabel 2.5	Komponen peran komite sekolah	63
Tabel 2.6	Program Komite Sekolah	64
Tabel 2.8.	Komponen Evaluasi, Aspek yang di Evaluasi dan Kriteria Evaluasi	117
Tabel 3.1	Daftar sekolah yang digunakan sebagai tempat penelitian	119
Tabel 3.2	Waktu Penelitian	121
Tabel 3.2	Kisi-Kisi Instrumen Konteks (<i>Context</i>)	125
Tabel 3.3	Kisi-Kisi Instrumen Masukan (<i>Input</i>)	126
Tabel 3.4	Kisi-Kisi Instrumen Proses (<i>Process</i>)	127
Tabel 3.5	Kisi-Kisi Instrumen Produk (<i>Product</i>)	128
Tabel 3.6	Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data	133
Tabel 3.2	Triangulasi Data Penelitian	139
Tabel 4.1.	Level dan Kriteria Standar Tujuan Pembentukan Komite Sekolah	147
Tabel. 4.2	Level dan Kriteria Standar Rekrutmen Pembentukan Komite Sekolah	159
Tabel. 4.3	Level Kriteria Standar Pertimbangan dan Arahan Komite Sekolah	173
Tabel. 4.4	Level Kriteria Standar Aspek Dukungan Dana dan Sumber Daya	182
Tabel 4.5	Level Kriteria Standar Peran Pengawasan Komite Sekolah	193
Tabel 4.6	Level Kriteria Standar Menyerap Aspirasi Keluhan, Kritik, Saran, dan Tindak Lanjut Komite Sekolah	201
Tabel 4.7	Level Standar Kriteria Aspek Peningkatan Kinerja Sekolah.....	208
Tabel 4.8	Rata-rata Capaian Nilai Kinerja Kepala Sekolah	217
Tabel 4.9	Rata-rata Capaian Nilai Kinerja Guru	219
Tabel 4.10	Perolehan Prestasi Akademik Nilai Ujian Sekolah	220
Tabel 4.11	Matrik Regulasi dan Hasil Penelitian Evaluasi Program Komite Sekolah	223
Tabel 4.12	Kontingensi Antarkomponen Evaluasi Program Komite Sekolah	252

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sub-fokus Penelitian Evaluasi Implementasi Program Komite Sekolah dengan CIPP	16
Gambar 2.2 Teori Kinerja Colquitt (Colquitt, Le Pine, 2011)	76
Gambar 2.3 Teori Kinerja Ivancevich (Ivancevich & Konopaske, 2013)	79
Gambar 2.1 Evaluasi model Stake (Arikunto & Safrudin, 2014)	92
Gambar 2.4 Jenis-jenis Evaluasi model CIIPP (Wirawan, 2011).....	106
Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	123



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Tujuan Pembentukan Komite Sekolah	150
Grafik 4.2 Rekrutmen Pembentukan Komite Sekolah	161
Grafik 4.3 Pertimbangan dan Arahan Komite Sekolah	175
Grafik 4.4 Dukungan Dana dan Sumber Daya Komite Sekolah	184
Grafik 4.5 Peran Pengawasan Komite Sekolah.....	194
Grafik 4.6 Menyeraf Aspirasi Keluhan, Kritik, Saran dan Tindak Lanjut	203
Grafik 4.7 Peningkatan Kinerja Sekolah	209
Grafik 4.8 Keterlaksanaan Program Komite Sekolah di Setiap Sekolah	221
Grafik 4.9 Ketercapaian Setiap Aspek Program Komite Sekolah	222
Grafik 4.10 Rata-rata Perolehan Capaian Kepuasan Stakeholder Sekolah....	259
Grafik 4.11 Rata-rata Capaian Kinerja Kepala Sekolah	260
Grafik 4.12 Rata-rata Capaian Nilai Kinerja Guru	261
Grafik 4.13 Rata-rata Perolehan Prestasi sekolah	263



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Kisi-Kisi Kuisisioner Angket Penelitian Evaluasi Program	
Komite Sekolah	294
LAMPIRAN 2 Pedoman Wawancara Komponen Evaluasi Program Komite	
Sekolah (Kontek)	297
LAMPIRAN 3 Hasil Wawancara	305
LAMPIRAN 4 Angket Penelitian “ Evaluasi Program Komite Sekolah	
Di Kecamatan Cipayung “	317
LAMPIRAN 5 Jawaban Angket Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan	
Rekrutmen Anggota Komite Sekolah Dasar di Kecamatan	
Cipayung	323
LAMPIRAN 6 Dokumentasi Photo Sekolah Responden dan Sarana Hasil	
Kerjasama Komite Sekolah	332
LAMPIRAN 7 Contoh Surat Keputusan Kepala SDN Negeri Lubang Buaya 13..	337
Contoh Anggaran Dasar (AD) Komite Sekolah	344
LAMPIRAN 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002	
Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah	355
LAMPIRAN 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik	
Indonesia	368